BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan atas Hukum.¹ maka setiap Tindak Pidana yang terjadi seharusnya di proses melalui jalur Hukum, jadi Hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu Tindak Pidana.

Tujuan terbentuknya negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea IV adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan dan keadilan sosial. Tujuan Negara tersebut akan tercapai salah satunya adalah melalui pembangunan demokrasi yang berkesinambungan. Demokrasi Indonesia dalam kaitannya dengan Indonesia sebagai Negara Hukum adalah bagaimana melindungi masyarakat dalam hak-hak asasi manusia yakni kebebasan dalam berbicara termasuk dalam masalah pemilihan umum.²

Pemilu adalah proses yang menjembatani warga negara dan negara. Pemilu diselenggarakan sebagai bentuk pengakuan hak warga negara dan hanya dapat dijalankan secara demokratis apabila hak warga negara, terutama dibidang politik, dilindungi. Karena itu, penyelenggaraan pemilu tidak boleh melanggar hak

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, cetakan I, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003, hal 200

konstitusional warga negara. Jika hal tersebut terjadi, merupakan kewajiban pengadilan untuk melindungi dan mengembalikan hak konstitusional ini meliputi hak memilih, hak untuk mencalonkan, dan hak untuk mengajukan calon serta bebas dari ketakutan dalam menjalankan hak-hak tersebut.³

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), pemilu bagi bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan Negara. UUD 1945 pasca perubahan mengatur secara khusus ketentuan tentang pemilu, yaitu pada Pasal 22E UUD 1945. Ketentuan ini mengamanatkan pelaksanaan pemilu secara berkala, 5 (lima) tahun sekali, untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, seta Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mencapai kualitas pemilu yang demokratis, UUD 1945 menentukan asas-asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, dan adil.

Suatu pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan sampai terisinya jabatan-jabatan yang dipilih, yaitu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak dapat dikatakan sebagai pemilu yang berhasil jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil.

Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia terkait dengan pemilihan menyampaikan suaranya, yaitu harus secara langsung tanpa diwakilkan, berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai

³ Janedjri M. Gaffar, *HUKUM PEMILU DALAM YURIPUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI*, Konstitusi press, jakarta 2013, hal 205

dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pe,ilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan dipilih. Sesuai dengan asas jujur, tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi. Sedangkan asas adil, adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta pemilu atau pemilih tertentu.⁴

Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggaraan pemilu. Asas jujur dan adil tidak hanya terwujud dalam mekanisme prosedural dalam pelaksanaan pemilu, tetapi juga harus terwujud dalam segala tindakan penyelenggaran, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah. Dengan demikian, asas jujur dan adil menjadi spirit keseluruhan pelaksanaan pemilu. Menurut Jimly Asshiddiqie, asas luber menyangkut sifat objektif yang harus ada dalam proses pelaksanaan atau mekanisme pemilu, terutama pada saat seseorang melaksanakan hak pilihnya. Sedangkan asas jurdil terutama terkait dengan sifat subjektif penyelenggaraan dan pelaksana pemilu yang harus bertindak jujur dan adil.⁵

Menurut Undang-Undang no 8 tahun 2012 tentang Pemilu dalam pasal 260 menjelaskan tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Penerapan sanksi tindak pidana pemilu diatur dalam KUHP sebagai hukum umum (*generalis*) dan Undang-Undang no 8 tahun 2012 tentang pemilu sebagai hukum (*spesialis*), dalam KUHP dasar hukum tersebut dimuat dari pasal 148 sampai dengan pasal 152 KUHP, sedangkan dalam Undang-Undang no 8 tahun 2012 tentang

⁴ Janedjri M. Gaffar, *DEMOKRASI DAN PEMILU DI INDONESIA*, Konstitusi press, jakarta 2013, hal 7

⁵ *Ibid*, hal 8

pemilu memuat 30 (tiga puluh) pasal tentang kejahatan tindak pidana pemilu, yaitu dari pasal 292 sampai dengan pasal 321.

Penyelesaian tindak pidana pemilu dijelaskan dalam Undang-Undang no 8 tahun 2012 tentang pemilu salah satunya diatur pada pasal 261;

1. Penyidik kepolisian negara republik indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14(empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
2. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mngembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian negara republik indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
3. Penyidik kepolisian negara republik indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
4. Penuntut umu melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangatlah kurang hal ini menjadikan banyaknya kasus-kasus tindak pidana pelanggaran Pemilu yang terjadi diIndonesia khususnya di Kota Gorontalo.

Kota Gorontalo (2014) panitia pengawas pemilu kota gorontalo menerima dan menemukan 10 kasus pelanggaran pemilu yang terjadi di pemilihan legislatif 2014, dari 10 kasus tersebut hanya satu kasus yang dibuatkan surat rekomendasi ke polres

gorontalo kota untuk tahap proses hukum selanjutnya yaitu penyidikan, karena 9 kasus lainnya untuk sementara belum cukup bukti untuk tahap proses hukum selanjutnya.

Salah seorang calon legislatif DPRD kota gorontalo dari partai persatuan pembangunan no urut 6 Betty Ibrahim, pada saat sudah masa tenang tepat hari minggu tanggal 6 april 2014 melakukan pelanggaran money politk, Ateng seorang sopir dan tim suksesnya betty ibrahim memanggil temannya seftian masyarakat kec dungingi untuk datang ke rumah Betty Ibrahim yang bertempat tinggal di perumahan pulubala kec kota tengah, seftian sendiri memanggil lagi teman-temannya untuk datang ke ruamhnya Betty Ibrahim, setelah mendapatkan 9 orang temannya maka mereka menjadi 10 orang dengan Seftian, kemudian Seftian dan temannya berangkat menuju rumahnya Betty Ibrahim, sampai di rumahnya Betty Ibrahim tepatnya pukul 17.00 di perumahan pulubala, mereka telah di sambut oleh saudara ateng dirumahnya Betty Ibrahim, kemudian setiap orang memasuki rumah berjabat tangan terlebih dahulu dengan Ateng, Ateng sendiri sudah menjadi orang khusus untuk menerima dan menyambut tamu yang datang, selama berjabat tangan dengan Ateng, Seftian dan temannya di minta bersumpah demi allah dan rasul saya akan memilih calon legislatif DPRD kota gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan no urut 6 Betty Ibrahim, mereka pun menurutinya setelah berjabat tangan mereka diberikan uang seratus ribu rupiah (100.000) setiap orangnya.

Tindakan tersebut ditemukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Gorontalo dari laporan masyarakat, setelah menerima laporan dari masyarakat panitia pengawas pemilu kota gorontalo segera menindak lanjuti pelanggaran money politik, Panitia Pengawas Pemilu Kota Gorontalo mengundang saksi yaitu Seftian dan temannya

untuk dimintai keterangan tentang adanya pelanggaran money politik, hasil keterangan Seftian dan temannya mengaku diberikan uang seratus ribu rupiah tiap orangnya dan bersumpah untuk memilih calon legislatif DPRD Kota Gorontalo Partai Persatuan Pembangunan no urut 6 Betty Ibrahim, uang seratus ribu rupiah yang berikan sudah dipakai membeli kebutuhan sehari-hari oleh temannya Seftian, hanya Seftian sendiri yang belum memakai uang tersebut, kemudian uang tersebut bernilai seratus ribu rupiah pemilik dari Seftian diambil oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Gorontalo untuk dijadikan barang bukti untuk tahap awal proses hukum.

Panitia Pengawas Pemilu Kota Gorontalo melihat pelanggaran money politik yang dilakukan oleh seorang calon legislatif DPRD Kota Gorontalo Partai Persatuan Pembangunan no urut 6 Betty Ibrahim sudah cukup bukti untuk ke tahap proses hukum selanjutnya, kemudian Panitia Pengawas Pemilu Kota Gorontalo membuat surat rekomendasi pelanggaran money politik yang dilakukan oleh seorang calon legislatif DPRD Kota Gorontalo Partai Persatuan Pembangunan no urut 6 Betty Ibrahim untuk serahkan ke Polres Gorontalo Kota tahap proses hukum selanjutnya.

Setelah menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Gorontalo, Polres Gorontalo Kotakhusunya anggota Reserse Kriminal melakukan tahap penyidikan terhadap kasus pelanggaran money politik, setelah melakukan tahap penyidikan Polres Gorontalo Kota anggota reserse kriminal menetapkan Betty Ibrahim dan Ateng sebagai tersangka karena dianggap melanggar Pasal 301 ayat (2) undang-undang no 8 tahun 2012 berbunyi Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Dan saudara Ateng dianggap melanggar Pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Kemudian berkas pelanggaran money politik dari Betty Ibrahim dan Ateng kepolisian Polres Gorontalo melimpahkan berkasnya ke kejaksaan negeri kota gorontao untuk tahap proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, kiranya penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Partai Politik Terhadap Tindak Pidana Pemilu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana pemilu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban partai politik dalam tindak pidana pemilu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Skripsi ini di harapkan dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan sebagai berikut

- a. pertanggung jawaban hukum dalam tindak pidana pemilu.
- b. Pertanggungjawaban partai politik dalam tindak pidana pemilu

2. Secara Praktis

Secara praktis Skripsi ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pelanggaran tindak pidana pemilu 2014 yang diatur dalam KUHP, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, serta Undang-undang terkait lainnya, sehingga dapat memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat. Sehingga untuk pemilu selanjutnya tidak akan ada lagi terjadi berbagai pelanggaran yang menimbulkan kerugian masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.